

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL: KERJASAMA EKONOMI MASYARAKAT ASEAN

**Oleh:
Bagus Indratno**

ABSTRACT

Micro economic environment is obviously influenced by the macro economic environment condition. The global economic condition forces firms to understand well the various trends so that they can decide plans and strategies match with the external condition. Although macro economic condition is only one of the external environment, but by analyzing the economic condition in the now and future condition, the firms will be able to forecast better. It is because economic condition is actually an intended change by such agreement and political will of the government. So by analyze the economic condition, it touches other external analysis, such as politic, law, and global condition. This article try for mapping the future economic condition using the agreement of FTA (Free Trade Area) that have been agreed by ASEAN (Association of South East Asia Nations) both intra and extra agreement. Understanding all ASEAN economic community agreement can be a valuable knowledge to every business.

Keywords: Free Trade Area, Association of South East Asia Nations

PENDAHULUAN

Era global sudah benar-benar menyebar ke hampir semua negara, tak terkecuali Indonesia, beberapa tahun ke belakang, di mana batas-batas yuridis suatu negara tetap, tetapi secara defakto, batas itu seakan hilang karena mudahnya keluar-masuk aliran informasi maupun komoditas dari wilayah suatu negara ke negara lain. Semua tidak dapat menghindar dari fenomena revolusi digital yang begitu cepatnya masuk menjadi kebutuhan sehari-hari. Ini berkonsekuensi pada semakin kokohnya era global. Jika dilihat perkembangan ini dari sisi ekonomi, maka berarti ada seperangkat kapabilitas baru yang dimiliki baik oleh produsen maupun konsumen yang tadinya tidak bisa dilakukan tetapi sekarang bisa dilakukan.

Produsen sekarang dapat mengumpulkan begitu banyak informasi yang dibutuhkan, sekaligus dapat menyebarkan informasi dengan sangat cepat, dan hal terpenting adalah penghematan biaya karena adanya hal tersebut. Sementara konsumen dapat mencari informasi produk yang dibutuhkan sedemikian lengkap termasuk perbandingan harga dan kualitasnya tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Kondisi dan situasi demikian mengalir seolah-olah tidak diniatkan dan tidak direncanakan. Pelaku ekonomi harus bisa menangkap apa yang menjadikan semua keadaan tersebut terjadi, apakah memang tidak direncanakan atau sebenarnya ada skenario yang menjadikan situasi persaingan saat ini terjadi dengan cepat, tak terhindarkan, dan seolah-olah tak terkendali . Dunia bisnis ada di dalam

supra sistem yang sangat luas dan saling mengait, sehingga pelaku ekonomi harus mampu menganalisis lingkungan eksternalnya dengan komprehensif.

Awal tahun 2010 diprediksi akan terjadi ledakan dasyat persaingan ekonomi antara ASEAN (*Assosiation of South East Asia Nations*)–China yang (sudah) melakukan kesepakatan perdagangan bebas yang sebenarnya sudah dirintis sejak pendekatan yang dilakukan oleh China pada tahun 2001 dalam ASEAN-China *Summit* di Bandar Seri Begawan. China mengusulkan sebuah proposal untuk menciptakan ASEAN-China sebagai suatu kawasan perdagangan bebas dalam kurun waktu sepuluh tahun. Setelah kesepakatan itu terjadi, bahkan ASEAN menjalin kerjasama ekonomi dengan berbagai macam kekuatan ekonomi lain di luar ASEAN yang muaranya adalah perdagangan bebas dengan pihak-pihak tersebut.

Walaupun sampai saat ini sepertinya tidak ada gerakan yang diarahkan untuk mendorong pelaku bisnis mempersiapkan diri terhadap persaingan bebas yang semakin dekat, namun sebagian besar pelaku bisnis dan juga masyarakat (konsumen) sudah menyadari dan merasakan gelombang dari berbagai komoditas impor yang semakin melimpah di pasar. Pemerintah sebagai penyetempel kerjasama-kerjasama itu seharusnya memberikan informasi yang cukup terhadap pelaku ekonomi, sehingga ketika perdagangan bebas benar-benar sudah diterapkan mereka sudah siap dan tidak ada alasan untuk mundur. Intinya pemerintah harus sudah bersinergi dengan pelaku bisnis untuk kasus ini. Tetapi, pelaku bisnis juga sudah seharusnya siap akan apapun yang terjadi, karena bisnis

adalah "perang", kapan serangan datang harus selalu siap, melalui analisis lingkungan eksternal. Satu sumber informasi eksternal yang penting untuk diketahui adalah kesepakatan kerjasama ASEAN baik dengan pihak intra maupun ekstra dalam rangka untuk membentuk *free trade area* (FTA) bersama.

PETA KERJASAMA EKONOMI ANTAR ANGGOTA ASEAN

Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya kerjasama ekonomi difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan (*preferential trade*), usaha patungan (*joint ventures*), dan skema saling melengkapi (*complementation scheme*) antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN, seperti ASEAN *Industrial Projects Plan* (1976), *Preferential Trading Arrangement* (1977), ASEAN *Industrial Complementation scheme* (1981), ASEAN *Industrial Joint-Ventures scheme* (1983), dan *Enhanced Preferential Trading arrangement* (1987).

Pada dekade 80-an dan 90-an, ketika negara-negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa cara terbaik untuk bekerjasama adalah dengan saling membuka perekonomian mereka, guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan.

Pada KTT ke-5 ASEAN di Singapura tahun 1992 telah ditandatangani *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic*

Cooperation sekaligus menandai dicanangkannya ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) pada tanggal 1 Januari 1993. Pendirian AFTA memberikan implikasi dalam bentuk pengurangan dan eliminasi tarif, penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, dan perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan fasilitasi perdagangan. Dalam perkembangannya, AFTA tidak hanya difokuskan pada liberalisasi perdagangan barang, tetapi juga perdagangan jasa dan investasi.

KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 menyepakati pembentukan komunitas ASEAN yang salah satu pilarnya adalah Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC). AEC bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas. KTT juga menetapkan sektor-sektor prioritas yang akan diintegrasikan, yaitu: produk-produk pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, produk-produk turunan dari karet, tekstil dan pakaian, produk-produk turunan dari kayu, transportasi udara, e-ASEAN (ITC), kesehatan, dan pariwisata. Dalam perkembangannya, pada tahun 2006 jasa logistik dijadikan sektor prioritas yang ke-12.

ASEAN *Economic Ministers Meeting* (AEM) di Kuala Lumpur bulan Agustus 2006 menyetujui untuk membuat suatu cetak biru (*blueprint*) untuk menindaklanjuti pembentukan AEC dengan mengidentifikasi sifat-sifat dan elemen-elemen AEC pada tahun 2015 yang konsisten dengan Bali Concord II dan dengan target-target dan *timelines* yang jelas serta *pre-agreed flexibility* untuk mengakomodir kepentingan negara-negara anggota ASEAN.

KTT ke-12 ASEAN di Cebu bulan Januari 2007 telah menyepakati "*Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*". Dalam konteks tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN telah menginstruksikan Sekretariat ASEAN untuk menyusun "*Cetak Biru ASEAN Economic Community (AEC)*". Cetak Biru AEC tersebut berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN, yaitu:

- Menuju *single market dan production base* (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal);
- Menuju penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (*regional competition policy, IPRs action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation, taxation*, dan pengembangan UKM);
- Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (*region of equitable economic development*) melalui pengembangan UKM dan program-program *Initiative for ASEAN Integration* (IAI); dan
- Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam *global supply network*).

Pelaksanaan rencana kerja strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui *priority actions* yang pencapaiannya dievaluasi dan dimonitor dengan menggunakan *score card*. Disamping itu, diperlukan dukungan berupa kemauan politik, koordinasi dan mobilisasi sumber daya, pengaturan pelaksanaan, peningkatan kemampuan (*capacity building*) dan penguatan institusi, serta peningkatan konsultasi

antara pemerintah dan sektor swasta. Pelaksanaan rencana kerja strategis tersebut juga akan didukung dengan program pengembangan sumber daya manusia dan kegiatan penelitian serta pengembangan di masing-masing negara.

Pada KTT ASEAN Ke-13 di Singapura, bulan Nopember 2007, telah disepakati *Blueprint for the ASEAN Economic Community* (AEC Blueprint) yang akan digunakan sebagai peta kebijakan (roadmap) guna mentransformasikan ASEAN menjadi suatu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan yang kompetitif dan terintegrasi dengan ekonomi global. AEC Blueprint juga akan mendukung ASEAN menjadi kawasan yang berdaya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi yang makin berkurang. Sebagai upaya untuk memfasilitasi perdagangan di tingkat nasional dan ASEAN sebagaimana tertuang dalam *AEC Blueprint 2015*, Indonesia telah melakukan peluncuran *National Single Window* (NSW) dalam kerangka *ASEAN Single Window* (ASW) pada tanggal 17 Desember 2007. Menurut rencana ASW akan diimplementasikan pada tahun 2009 (deplu.go.id).

PETA KERJASAMA EKONOMI ASEAN DENGAN NON-ASEAN

Perdagangan bebas dengan non-ASEAN sebenarnya bukanlah elemen utama dalam diplomasi ekonomi Internasional ASEAN. Integrasi Ekonomi ASEAN telah menjadi prioritas sejak keputusan tahun 1992 untuk sebuah AFTA (*ASEAN Free Trade Area*). Akan tetapi dalam kenyataannya, beberapa kesepakatan kerjasama ekonomi dalam rangka penerapan perdagangan bebas

sudah dilaksanakan, bahkan dampaknya sudah terasa.

ASEAN-China

Perdagangan bebas dengan non-ASEAN diawali dari pendekatan yang dilakukan oleh China, tahun 2001 dalam ASEAN-China Summit di Bandar Seri Begawan, China mengusulkan sebuah proposal untuk menciptakan ASEAN-China sebagai suatu kawasan perdagangan bebas dalam kurun waktu sepuluh tahun. Awalnya sebenarnya hanya sebagai bahan usulan untuk dipelajari oleh negara ASEAN, tetapi dalam perkembangannya kedua belah pihak melakukan negosiasi lebih intens. Bahkan dalam pertemuan Para Kepala Negara ASEAN dan China di Phnom Penh bulan November 2002 mereka menandatangani suatu *Framework Agreement CEC* (*Comprehensive Economic Cooperation*) yang didalamnya ada komponen perdagangan bebas (FTA).

Kerjasama itu terdiri dari tiga elemen, yaitu liberalisasi, fasilitasi, dan kerja sama ekonomi. Elemen liberalisasi meliputi perdagangan barang dan jasa serta investasi. *Early Harvest Program* ada di dalam persetujuan itu yang meliputi produk-produk yang akan diliberalisasi lebih dulu, yaitu binatang hidup, pohon hidup, daging, ikan, buah-buahan, dan sayur-mayur. Awalnya diusulkan tarif produk di bawah program ini harus nol persen dalam kurun waktu tiga tahun. Program ini berlaku untuk ASEAN-6 (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura, dan Thailand). Sedangkan CMLV (Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam) tarif nol persen harus sudah terjadi pada tahun 2010.

Setelah melalui tarik ulur, akhirnya negosiasi FTA di bawah program *Early Harvest Program*

diputuskan pada 30 Juni 2004, dan dalam ASEAN Summit di Vientiane pada November 2004 ditandatangani. Penurunan dan penghapusan tarif dimulai pada 1 Januari 2005. Satu kesepakatan juga ditandatangani pada pertemuan itu, yaitu *Agreement on Dispute Settlement Mechanism of the Framework Agreement on CEC* yang mengatur mekanisme seandainya terjadi perselisihan yang nantinya akan diikuti oleh kesepakatan-kesepakatan baru pada produk jasa, investasi, dan lainnya. Cukup mencengangkan bagaimana dalam waktu yang relatif pendek dua kesepakatan ditandatangani antara ASEAN dan China. Implementasi penurunan tarif efektif dimulai 1 Juli 2005 secara gradual yang pada tahun 2010 harus sudah 0 % untuk ASEAN-6 dan pada tahun 2015 harus 0 % untuk ASEAN-CMLV, walaupun memang ada perbedaan perlakuan untuk masing-masing anggota ASEAN terkait dengan penentuan barang yang dianggap dalam track normal dan sensitif dalam perdagangan bebas tersebut (Soesastro, 2005).

ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)

Pada Januari 2002, saat berkunjung ke Singapura, Perdana Menteri Jepang, Koizumi, mengumumkan ketertarikan Jepang untuk membentuk suatu Economic Partnership Agreement dengan ASEAN, walaupun secara bilateral telah menjalin kerjasama Free Trade Area dengan Singapura. Langkah ini senyatanya adalah reaksi atas gerakan China yang sudah lebih dahulu membentuk ASEAN-China *Comprehensive Economic Cooperation Agreement*.

Akhirnya, pada ASEAN-Japan Summit, November 2002, disetujui untuk

merealisasikan suatu *Comprehensive Economic Partnership* (CEP), termasuk elemen FTA, yang akan segera direalisasikan dalam 10 tahun (tahun 2012). Sebuah komite dibentuk untuk menyusun draft kerjasama dan ditandatangani pada Oktober 2003 di Bali. Kedua belah pihak setuju untuk mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut (Soesastro, 2005):

- a. ASEAN-Japan CEP harus melibatkan seluruh anggota ASEAN dan meliputi kerjasama pada sektor berfokus pada liberalisasi, fasilitasi, dan kerjasama.
- b. Integritas, solidaritas dan integrasi ASEAN akan dipertimbangkan dalam realisasi ASEAN-Japan CEP.
- c. Persetujuan tetap harus konsisten dengan disiplin dan aturan WTO Agreement,
- d. Perlakuan khusus dan berbeda harus diberikan kepada anggota ASEAN karena perbedaantingkat pembangunan ekonomi, dan tambahan fleksibilitas harus diberikan kepada anggota ASEAN yang lebih baru,
- e. Fleksibilitas harus diberikan untuk masing-masing sektor sensitif di negara anggota ASEAN dan Jepang, dan
- f. Kerjasama teknis dan kapasitas program pembangunan juga harus dipertimbangkan

Walaupun, sepertinya Jepang telat dibandingkan China, namun sebenarnya Jepang menerapkan kerjasama ganda, melalui ASEAN sebagai lembaga dan langsung bekerjasama secara bilateral dengan beberapa Negara ASEAN.

ASEAN-India

Pada tahun 2002 ASEAN dan India sepakat untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan untuk bekerja menuju

ASEAN-India Regional Trade and Investment Area (RTIA). Kemudian pada Oktober 2003 di Bali, Kepala Negara /Pemerintahan ASEAN dan India menandatangani suatu *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation* (CEC). *Framework Agreement* ini sangat mirip dengan apa yang sudah dilakukan ASEAN dengan China, karena memang diinspirasi oleh kerjasama ini ACFTA (Soesastro, 2005), dengan jadwal liberalisasi sebagai berikut:

- a. 1 Januari 2006 sampai 31 Desember 2011 untuk Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan India,
- b. 1 Januari 2006 sampai 31 Desember 2016 untuk Philipina, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, dan India

ASEAN-Korea

Sebuah deklarasi bersama mengenai *Comprehensive Cooperation Partnership* (CCP) ditandatangani di Vientine Summit pada bulan November 2004. Pembentukan ASEAN Korea FTA (AKFTA) dipandang sebagai suatu "perpanjangan alami" dari hubungan yang ada serta sebagai batu loncatan untuk meningkatkan hubungan ASEAN-Korea ke tingkatan yang lebih tinggi dan lebih komprehensif. AKFTA mirip dengan FTA ASEAN lainnya dalam hal cakupan yang komprehensif dan penyisihan fleksibilitas untuk negara-negara CLMV.

Negosiasi mengenai AKFTA dimulai pada awal 2005 dan selesai dalam waktu dua tahun. Walaupun negosiasi AKFTA agak tertinggal dibandingkan dengan ASEAN-China, ASEAN-Jepang, dan ASEAN-India, namun niat untuk mewujudkan kerjasama liberalisasi tersebut disepakati lebih awal, dimana paling sedikit 80%

dari produk akan memiliki tarif nol pada tahun 2009, dan tetap memper-timbangkan fleksibilitas tambah-an untuk negara Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. AKFTA mungkin menjadi Perjanjian yang akan mendorong FTA lain untuk lebih cepat mereka implementasikan.

AFTA- Closer Economic Relations (CER)

Perlu dicatat bahwa ide tentang AFTA-CER (Closer Economic Relations antara Australia dan New Zealand) FTA diajukan pada tanggal yang lebih awal dari FTA ASEAN-China. Namun karena alasan-alasan kebelumsiapan, tingkat pembicaraan, dan alasan sensitif lainnya, baru pada September 2002 pada deklarasi ministerial kesepakatan ditandatangani untuk membangun blok ekonomi yang lebih besar. Bidang kerjasama di bawah CEP (Closer Economic Partnership) akan diperluas mencakup, tetapi tidak terbatas pada, mempromosikan dan memfasilitasi perdagangan dan investasi, pembangunan kapasitas, isu-isu ekonomi baru dan kerjasama bidang lainnya.

Walaupun kesepakatan sudah ditandatangani, akan tetapi tidak banyak implementasi kesepakatan terjadi antara kedua belah pihak, sampai akhirnya pada deklarasi antar pimpinan kedua belah pihak di Vientine pada Nopember 2004, mengumumkan untuk memulai negosiasi pada tahun 2005 dan selesai dalam dua tahun. Hambatan perdagangan barang, jasa dan investasi yang akan semakin dieliminasi dengan tetap melihat komitmen/prinsip dalam WTO. Kerjasama kedua belah pihak ini juga akan memiliki fleksibilitas ketentuan seperti dalam FTA ASEAN lainnya. Diharapan FTA akan sepenuhnya

dilaksanakan dalam waktu 10 tahun (tahun 2017).

ASEAN-Amerika

Selama pertemuan APEC di Meksiko pada tahun 2002, Presiden Bush mengumumkan *Enterprise for ASEAN Initiative* (EAI). Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi, politik-keamanan AS dalam hubungannya dengan Asia Tenggara. Hal ini sering diartikan sebagai inisiatif untuk mendukung perang AS terhadap terorisme global (Soesastro, 2005). Akan tetapi, masa-masa berikutnya EAI ini berjalan terpisah secara bilateral langsung antara anggota ASEAN dengan AS. AS tidak mengembangkan Kerangka Kerja Perjanjian (atau perjanjian payung) dengan ASEAN secara keseluruhan.

ASEAN – European Union FTA

Sebuah deklarasi bersama sebenarnya telah ditandatangani pada November 2007, tetapi perundingan-perundingannya masih terus berjalan sampai saat ini. Uni Eropa mengartikan respon akan rencana kerjasama untuk membentuk FTA ini dari ASEAN. Saat ini sedang dilakukan perundingan terus-menerus di dalam *Joint Committee for the EU-ASEAN Free Trade Agreement*. Perundingan terakhir telah berlangsung di Brussels, Belgia dari tanggal 30 Januari – 1 Februari 2008. Diagendakan bahwa pertemuan *Joint Committee* berikutnya akan lebih intensif diadakan di Negara-negara ASEAN. Ini merupakan langkah agresif dari pihak Uni-Eropa, sebagaimana dikatakan Peter Mandelsohn, *EU Trade Commissioner*; “*Strengthening the commitment and focus of EU trade policy in Asia is an important part of the EU's Global Europe trade strategy. An EU-ASEAN FTA is a*

key part of that. This meeting helped clarify issues and map out the work ahead. I remain strongly committed to a wide-ranging twenty-first century trade agreement”.

ASEAN-East Asia Free Trade Area (EAFTA)

Kerjasama FTA dengan Negara Asia Timur ini masih dalam konsultasi dan studi/ penelitian lebih lanjut. Dalam kaitannya dengan gagasan pembentukan *East Asia Free Trade Area* (EAFTA), maka pada KTT ke-12 APT (ASEAN-plus Three (China, Jepang, Korea)) yang dilaksanakan di Cha-am Hua Hin, Thailand pada tanggal 24 Oktober 2009, direkomendasikan pembentukan EAFTA untuk memperkuat ketahanan perekonomian regional Asia Timur dan melakukan negosiasi EAFTA paling lambat pada tahun 2012.

IMPLIKASI FTA ASEAN

Kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) adalah kerangka ekonomi utama di kawasan ASEAN. AFTA diterapkan melalui Skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) yang mencanangkan semua tarif bakal dihapus sebelum tahun 2010 untuk ASEAN-6 dan sebelum tahun 2015 untuk CLMV. ASEAN berharap dapat membentuk sebuah pasar tunggal dan basis produksi sebelum tahun 2015. Artinya, sebelum tahun 2015, pergerakan barang, jasa, investasi, dan buruh terampil di ASEAN akan dibuka dan diliberalisasi sepenuhnya, sementara aliran modal akan dikurangi hambatannya. Seluruh produk sensitif akan dimasukkan dalam skema tersebut sebelum tahun 2018. Namun dalam liberalisasi ini, masih ada kekecualian, pengecualian dan hambatan-hambatan (khususnya dalam aliran uang dan

modal), dan para anggota yang belum siap untuk meliberalisasi sektor jasa dapat memilih menunda pembukaan sektor tersebut (Formula ASEAN minus X). Namun, tujuan strategis dan komitmen kesepakatan ini adalah menyingkirkan semua hambatan dan pengecualian ini, dan seluruh Anggota harus memiliki komitmen yang sama.

Walaupun *starting point* kerjasama antar anggota ASEAN lebih dulu dicanangkan, akan tetapi beberapa implementasi FTA *Agreement*-nya malahan didahului oleh kerjasama ASEAN dengan non ASEAN yang sudah dijabarkan di atas. Kejar-kejaran *intra-dan extra-ASEAN FTA trade* harus dipahami betul oleh pelaku bisnis, karena dengan mengetahui jadwal

tersebut, maka analisis lingkungan eksternal akan lebih bermakna bagi mereka. Tabel 1 di bawah ini setidaknya dapat dijadikan acuan tentang kemungkinan persaingan ekonomi di waktu yang akan datang.

Pelaku bisnis tidak dapat menghindari dari keadaan perdagangan bebas yang akan terlaksana, bahkan beberapa persetujuan sebenarnya sudah terimplementasi pengurangan tarifnya. Salah satu contoh adalah apa yang terjadi dengan ACFTA, sebenarnya membanjirnya produk China karena sejak tahun 2005 tarif dan bea masuk sudah mulai dikurangi, jadi tahun 2010 nanti hanyalah “gong penutup” bahwa tarif sudah 0 %.

Tabel I. Intra- dan Extra-ASEAN FTA Trade

Kerjasama	Pencanangan	Implementasi	Keterangan
Intra-ASEAN	Tahun 1993	Paling lambat 2015 dan tuntas sebelum 2018	Tetap ada kekecualian, pengecualian, dan hambatan untuk negara anggota ASEAN yang belum siap
ACFTA (ASEAN-China)	Tahun 2001 (Usulan Pertama dari China)	Tahun 2010 dan 2015	Implementasi penurunan tarif efektif dimulai 1 Juli 2005 secara gradual yang pada tahun 2010 harus sudah 0 % untuk ASEAN-6 dan pada tahun 2015 harus 0 % untuk ASEAN-CMLV
AJCEP (ASEAN-Jepang)	Tahun 2002	Tahun 2012	Walaupun, sepertinya Jepang telat dibandingkan China, namun sebenarnya Jepang menerapkan kerjasama ganda, melalui ASEAN sebagai lembaga dan langsung bekerjasama secara bilateral dengan beberapa Negara ASEAN
ASEAN-India	Tahun 2002	Tahun 2011 dan 2016	a. 1 Januari 2006 sampai 31 Desember 2011 untuk Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan India, b. 1 Januari 2006 sampai 31 Desember 2016 untuk Philipina, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, dan India
ASEAN-ROK (ASEAN-Korea)	Tahun 2004	Tahun 2009	Paling sedikit 80% dari produk akan memiliki tarif nol pada tahun 2009, dan tetap mempertimbangkan fleksibilitas tambahan untuk negara Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam
AFTA-CER (ASEAN-Australia dan Selandia Baru)	Tahun 2002	Tahun 2017	Memulai negosiasi pada tahun 2005 dan selesai dalam dua tahun. Diharapkan FTA akan sepenuhnya dilaksanakan dalam waktu 10 tahun, memiliki fleksibilitas ketentuan seperti dalam FTA ASEAN lainnya
ASEAN-Amerika	Tahun 2002	Belum ada kesepakatan jelas	AS tidak mengembangkan Kerangka Kerja Perjanjian (atau perjanjian payung) dengan ASEAN secara keseluruhan
ASEAN – European Union FTA	Tahun 2007	Masih terus dilakukan perundingan	Diagendakan bahwa pertemuan <i>Joint Committee</i> berikutnya akan lebih intensif diadakan di Negara-negara ASEAN
ASEAN-East Asia Free Trade Area (EAFTA)	Tahun 2009	Masih terus dilakukan perundingan	Pada KTT ke-12 APT (ASEAN-plus Three (China, Jepang, Korea)) yang dilaksanakan di Cha-am Hua Hin, Thailand pada tanggal 24 Oktober 2009, direkomendasikan pembentukan EAFTA untuk memperkuat ketahanan perekonomian regional Asia Timur dan melakukan negosiasi EAFTA paling lambat pada tahun 2012

Melihat persaingan yang akan terjadi, pelaku bisnis lokal harus menyadari betul bahwa lawan-lawan mereka adalah para raksasa ekonomi yang sedang bergeliat, seperti China dan India. Bahkan beberapa adalah negara maju seperti Jepang, Korea, AS, dan Negara-negara Eropa. Hal ini penting agar jangan sampai ketika implementasi FTA terjadi, mereka tidak siap dan akan menjadi penonton dan korban globalisasi ekonomi.

China adalah pihak yang paling agresif untuk bekerja sama dengan ASEAN dan juga pihak-pihak lain. Beberapa pakar baik dalam maupun luar negeri secara esensial memandang bahwa proposal awal kerjasama China sangat dimotivasi oleh unsur kepentingan politik China, akan tetapi kedua belah pihak menganggap inisiatif proposal itu adalah masalah ekonomi semata. Kendali perjanjian kedua belah pihak lebih ada di pihak China dengan pengalaman negosiasi yang cukup panjang dan sulit terkait penolakan WTO (*World Trade Organization*) terhadap China.

China benar-benar membutuhkan pasar untuk melemparkan melambungnya produktifitas pada hampir semua industri yang dimiliki. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa sejak awal tahun 90-an kecepatan pertumbuhan ekonomi China mencapai rata-rata 10 persen. Krisis Asia tahun 1997-1998 yang melanda Asia Timur, Asia Tenggara, termasuk juga Indonesia tidak berpengaruh terhadap perekonomian China. Bahkan pertumbuhan ekonominya terus bertumbuh pada kisaran 7 persen. Sementara perekonomian Indonesia tumbuh positif baru dimulai tahun 2000, itupun dengan peningkatan yang lambat.

PENUTUP

Tidak diragukan lagi, ASEAN sebagai kelompok maupun individual akan menghadapi tantangan dan sekaligus peluang dari kerjasama-kerjasama yang sudah disepakati. Tantangannya adalah persaingan yang semakin ketat, dan peluangnya adalah semakin terbukanya pasar-pasar raksasa yang mungkin dapat menyerap produk mereka. Keunggulan komparatif yang kuat dimiliki oleh China, sedangkan keunggulan kompetitif yang kuat dimiliki oleh negara-negara maju seperti Jepang dan Korea.

Peran pemerintah seharusnya dilakukan secara intens melalui berbagai kebijakan, fiscal maupun moneter, agar ekonomi domestik semakin kokoh. Selain itu juga pemerintah, sebagai pihak yang tahu persis akan kesepakatan-kesepakatan ini, harus bisa *blow up* kesepakatan yang sudah ditandatangani sehingga pelaku bisnis mendapatkan informasi yang cukup sebagai bahan kesiapan mereka dalam bersaing. Termasuk informasi tentang kelemahan dan kelebihan dari masing-masing negara sebagai dasar analisis mengenai lingkungan makro eksternal. Perdagangan bebas dari persepsi konsumen memang menyenangkan, karena semakin banyak pilihan, sehingga harga semakin rendah, karena produsen tidak dapat memperoleh keuntungan abnormal akibat pasar semakin monopolistik (banyak penjual, tetapi masing-masing produk masih dapat dibedakan) sehingga persaingan semakin ketat. Akan tetapi dari persepsi produsen, perdagangan bebas adalah ancaman sekaligus peluang.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN, 2007, ASEAN Economic Community Blueprint. Available online at: http://www.13thaseansummit.sg/asean/index.php/web/documents/documents/asean_economic_blueprint
- ASEAN-China Expert Group on Economic Cooperation, 2001, "Forging Closer ASEAN China Economic Relations in the 21st Century", Mimeo, October, Jakarta.
- Chaves, Jok Jenina, 2008, *Memahami Piagam ASEAN dan Cetak Biru Kerjasama Masyarakat Ekonomi ASEAN, AFA ASIADHRRRA and API Issue Paper*, 12 Vol 3 No. 1 Pebruari 2008
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Menuju ASEAN Economic Community 2015*, <http://deperindag.go.id>
- Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Berbagai Kesepakatan Kerjasama Ekonomi ASEAN*, <http://deplu.go.id>
- <http://www.aseancommunityindonesia.org>
- Sheng Lijun, 2002, *FTA with ASEAN as a safety cushion for China*, The StraitsTimes, 8 December
- Soesastro, Hadi, 2005, *The Evolution of ASEAN+X Free Trade Agreements: Implications for Canada*, Economics Working Paper Series, <http://www.csis.or.id/papers/wpe089>
- Tulus, Tambunan, 2005, *Is ASEAN Still Relevant In The Era Of The ASEAN-China FTA?*, www.kadin-indonesia.or.id

